



DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI

BTKI 2017 dan IDENTIFIKASI PERUBAHAN POS TARIF PRODUK SEKTOR INDUSTRI AGRO

Direktorat Teknis Kepabeanaan

24 Februari 2017



OUTLINE

- 1 • LATAR BELAKANG
- 2 • PENYUSUNAN BTKI 2017
- 3 • DAMPAK PERUBAHAN BTKI
- 4 • PMK 06/PMK.010/2017
- 5 • GAMBARAN AMANDEMEN

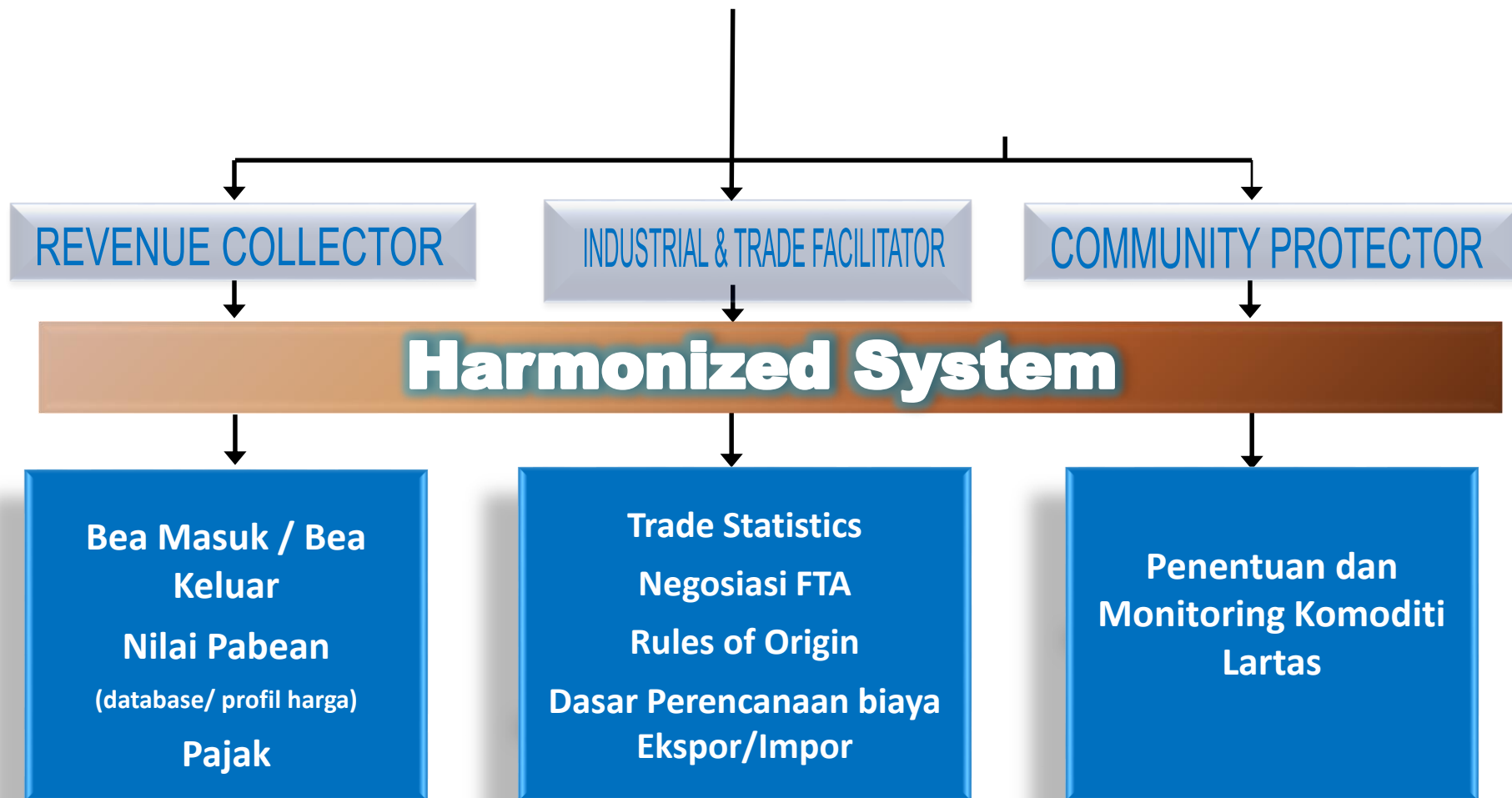


1

- **LATAR BELAKANG**



DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI





KONVENSI HS

Indonesia adalah contracting party dari International Convention on The Harmonized Commodity Description and Coding System

Kewajiban contracting party antara lain:

1. Menyusun nomenklatur tarif dan statistik dengan HS
2. Mempublikasikan statistik impor dan ekspor sesuai dengan 6 digit HS
3. Menerapkan amandemen HS sesuai tanggal yg ditetapkan



PROTOCOL AHTN

Indonesia adalah anggota ASEAN dan telah menandatangani *Protocol Governing The Implementation of AHTN*

Kewajiban penandatanganan protocol antara lain:

1. Menggunakan KUMHS, Catatan dan seluruh struktur HS
2. Menggunakan AHTN 8 digit untuk seluruh kepentingan tarif, statistik dan lainnya.



HARMONIZED SYSTEM

Apa yang dimaksud dengan Harmonized System

- Harmonized Commodity Description and Coding System, biasa dikenal sebagai Harmonized System (HS) adalah “*a multipurpose international product nomenclature*”.
- Berdasarkan konvensi internasional yang disusun oleh WCO dan diratifikasi/digunakan oleh hampir seluruh negara di dunia sejak 1 Januari 1988.
- Konvensi yang mengatur tentang struktur klasifikasi barang perdagangan dalam bentuk kelompok-kelompok barang berdasarkan pos dan sub-pos dan dilengkapi Ketentuan Umum Untuk Menginterpretasi serta Catatan.



ASEAN HARMONISED TARIFF NOMENCLATURE

- Berdasarkan *Protocol Governing The Implementation of AHTN* yang disahkan oleh Para Menteri Keuangan ASEAN tanggal 8 Agustus 2003.
- Adalah sistem klasifikasi barang yang diterapkan secara seragam pada negara anggota ASEAN yang dilaksanakan dengan prinsip *Transparency, Consistency, Simplicity*, dan *Uniformity*.
- Disusun dan dibahas berdasarkan masukan dari masing-masing negara ASEAN dalam forum AHTN Task Force yang beranggotakan *classification experts* dari negara anggota ASEAN.



ASEAN HARMONISED TARIFF NOMENCLATURE

- Merupakan pengembangan dari HS berupa penambahan 2 digit pada 6-digit HS sehingga struktur klasifikasi yang digunakan di seluruh negara ASEAN seragam yaitu 8 digit.
- Dilengkapi dengan supporting references :
 1. *Supplementary Explanatory Notes* atau Catatan Penjelasan Tambahan untuk memberikan penjelasan teknis dan spesifikasi barang-barang yang dirinci pada pos AHTN.
 2. *Concordance Tables* atau Tabel Korelasi yang memuat mengenai korelasi pos-pos AHTN sebelumnya dengan AHTN *existing* dan sebaliknya.



BUKU TARIF KEPABEANAN INDONESIA

- BTKI adalah Buku Tarif Kepabeanan Indonesia yang memuat nomenklatur klasifikasi barang yang disusun berdasarkan HS dan AHTN
- BTKI memuat KUMHS, Catatan Bagian, Catatan Bab, Catatan Sub Pos, Struktur Klasifikasi Bab 1 s.d Bab 98, dan besaran tarif (BM MFN, BK, PPN, PPNBM)
- BTKI diberlakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan



BUKU TARIF KEPABEANAN INDONESIA

TAHUN	BUKU TARIF/HS/AHTN YANG BERLAKUKAN
1989	Implementasi HS versi awal di Indonesia (HS 1988)
1993	Indonesia menjadi contracting party Konvensi HS
1994	Penerbitan BTBMI 1994 berdasarkan HS 1992
1996	Penerbitan BTBMI 1996 berdasarkan HS 1996
2003	Penerbitan BTBMI 2003 berdasarkan HS 2002
2004	Penerbitan BTBMI 2004 berdasarkan HS 2002 dan AHTN 2002
2007	Penerbitan BTBMI 2007 berdasarkan HS 2007 dan AHTN 2007
2012	Penerbitan BTKI 2012 berdasarkan HS 2012 dan AHTN 2012
2017	Penerbitan BTKI 2017 berdasarkan HS 2017 dan AHTN 2017



2

PENYUSUNAN BTKI



LATAR BELAKANG (5)

Mengapa harus menyusun BTKI 2017?

Harmonized System (HS) secara rutin (setiap 5 th) di amandemen oleh WCO sehingga berdampak pada AHTN dan BTKI yang harus disesuaikan dengan struktur HS yang baru sekaligus me-review struktur AHTN.

HS bersifat dinamis dan berkembang sesuai:

Perkembangan teknologi

Perubahan pola perdagangan

Situasi dan kondisi di dunia

Apa yg berubah secara signifikan pd BTKI 2017?

menggunakan AHTN 2017 menjadi BTKI 2017 (**8 digit pos tarif**) tanpa pemecahan pos nasional seperti BTKI 2012



Mengapa harus menjadi 8 digit?

A single tariff nomenclature...

Rekomendasi AHTN Task Force dan sesuai AHTN Protocol

Mensupport pembentukan AEC (ASEAN Economic Community)

Sebagai dasar pembentukan ASEAN Single Window

Sebagai embrio penerapan Single Document Export-Import (ASEAN Customs Declaration Document) antar negara anggota ASEAN



PENYUSUNAN AHTN 2017

Penyusunan BTKI 2017 dimulai dengan pembahasan dan penyusunan AHTN 2017 dalam forum AHTN Task Force





PENYUSUNAN AHTN 2017

- Indonesia langsung menggunakan AHTN 2017 menjadi BTKI 2017 tanpa pemecahan pos nasional seperti BTKI 2012, sehingga kepentingan Indonesia yang terkait dengan struktur klasifikasi telah dibahas dalam sidang AHTN.
- Pembahasan intensif dilakukan dengan BKF, Ditjen Pajak, PP INSW, Kemendag, Kemenperin, Kementan, Badan POM, Kemenkes, KLHK, KKP dan instansi terkait lainnya
- Usulan Indonesia dalam AHTN 2017 mencakup berbagai produk dari Bab 01-97, terdiri dari sebagai berikut :
 - ❖ Usulan **create** : pos nasional existing atau pos baru yang memenuhi syarat pengusulan dan pos baru yang saat ini belum ada dalam BTKI 2012
 - ❖ Usulan **retain** : pos AHTN dalam BTKI 2012 yang memenuhi syarat antara lain dari sisi perdagangan dan perbedaan BM MFN/FTA



DAMPAK PERUBAHAN BTKI

Bea Masuk/ Bea Keluar

- Penerbitan PMK tentang BM MFN dan Bea Keluar,
- Penerbitan PMK FTA (7 FTA) dan PMK terkait BM lainnya

PDRI

- Penerbitan PMK PPnBM dan PPh Pasal 22
- Penyusunan tabel komoditi PPN

CEISA/INSW

- Perubahan modul PIB dan aplikasi di CEISA menjadi 8 digit
- Penyusunan database dan uploading tabel referensi tarif, uraian, lartas dan tabel lainnya

LARTAS

- Konversi database lartas yang ada di INSW
- Penerbitan aturan lartas masing2 K/L (jika memungkinkan)
- Penyesuaian sistem dan aplikasi di masing-masing K/L

SISTEM

- Penyesuaian IT Inventory atau aplikasi di perusahaan yang berbasis kode HS



PERBEDAAN HS / AHTN / BTKI 2012 dan 2017

	BTKI 2012	BTKI 2017
STRUKTUR KLASIFIKASI	10 digit XXXX.XX.XX.XX	8 digit XXXX.XX.XX
JUMLAH BAB	98 Bab Bab 01 - 97 dari WCO, dan Bab 98 Kebijakan Nasional	98 Bab Bab 01 - 97 dari WCO, dan Bab 98 Kebijakan Nasional
JUMLAH SUB POS WCO	5.205 6 digit sub pos HS	5.387 6 digit sub pos HS
JUMLAH POS TARIF BTKI	10.025 Termasuk Bab 98	10.826 termasuk Bab 98



PERKEMBANGAN HS / AHTN / BTKI

	2004	2007	2012	2017
STRUKTUR KLASIFIKASI	10 digit XXXX.XX.XX.XX			8 digit XXXX.XX.XX
BAGIAN	21	21	21	21
BAB	98 Bab Bab 01 - 97 dari WCO, dan Bab 98 Kebijakan Nasional			
POS	1.247	1.224	1.224	1.222
SUB POS	5.225	5.062	5.205	5.387
SUB POS AHTN	10.697	8.311	9.558	10.826
POS TARIF NASIONAL	11.173	8.744	10.025	SUBPOS AHTN = POS TARIF NASIONAL





4

PMK-6/PMK.010/2017

**tentang Penetapan Sistem Klasifikasi
Barang dan Pembebanan Tarif Bea
Masuk atas Barang Impor**



CAKUPAN PMK

Menetapkan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor yang meliputi:

- Ketentuan Umum untuk Menginterpretasi *Harmonized System* (KUMHS) (Lampiran I)
- Catatan Bagian, Catatan Bab, dan Catatan Subpos (Lampiran II).
- Struktur Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk (Lampiran III)



HAL-HAL LAIN YANG DIATUR

- Struktur Klasifikasi yang ditetapkan sesuai PMK 06/PMK.010/2017 berlaku tidak hanya untuk kepentingan bea masuk :

“Ketentuan mengenai sistem klasifikasi barang yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku secara mutatis mutandis bagi sistem klasifikasi barang yang digunakan dalam ketentuan di bidang tarif dan non tarif, termasuk bidang kepabeanan, cukai, perpajakan, fiskal, perdagangan, industri, dan investasi”



PEMBERLAKUAN PMK

Peraturan Menteri ini mulai berlaku
pada tanggal 1 Maret 2017

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PMK No 213/PMK.010/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor sebagaimana telah diubah dengan:

- PMK No 133/PMK.011/2013
- PMK No 97/PMK.010/2015;
- PMK No 132/PMK.010/2015
- PMK No 35/PMK.010/2016
- PMK No 134/PMK.011/2016



dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

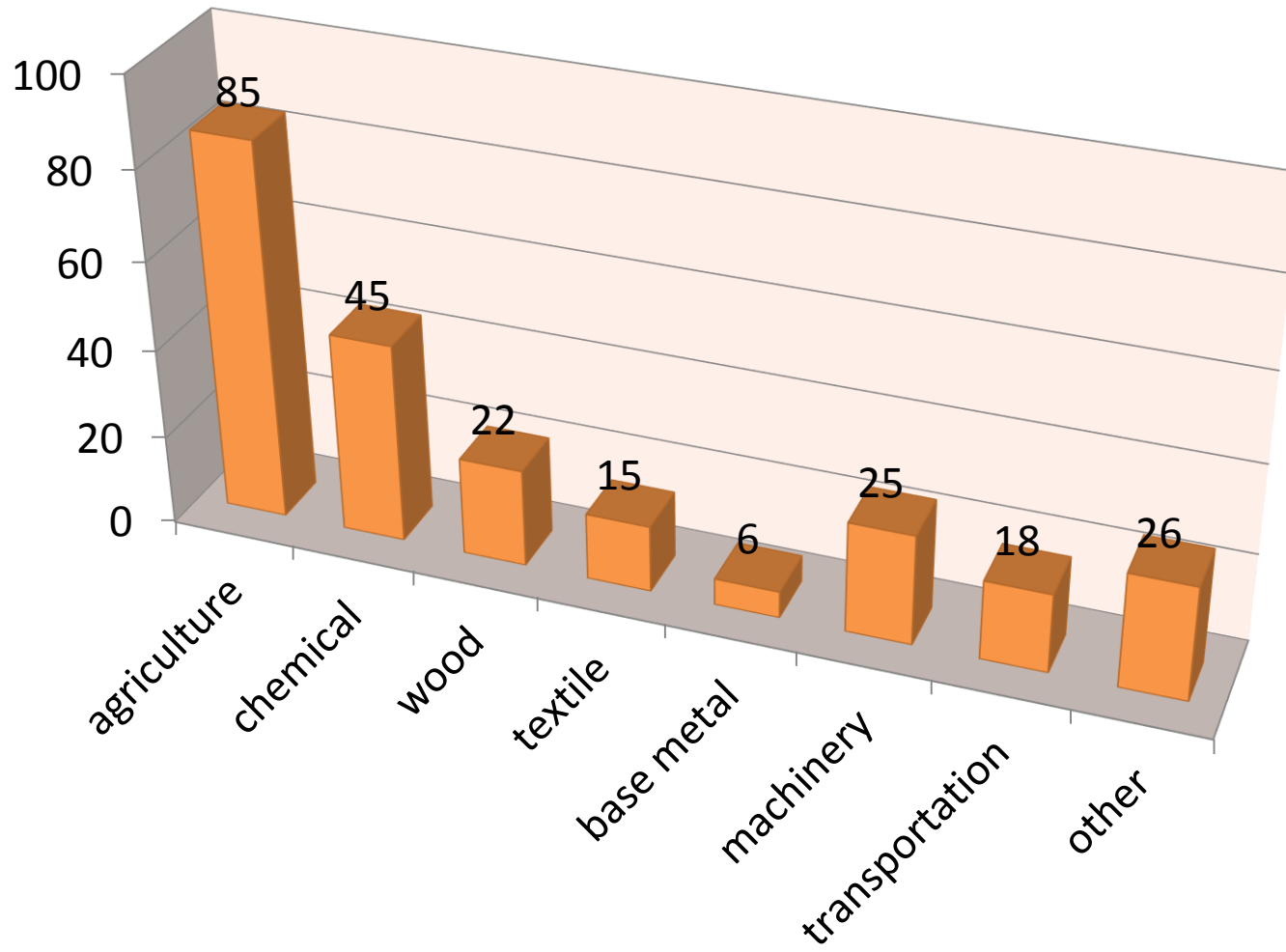


5

GAMBARAN AMANDEMEN



AMANDEMEN HS 2017





GAMBARAN AMANDEMEN

PERUBAHAN STRUKTUR KLASIFIKASI

- PENAMBAHAN POS/SUBPOS
- PENGHILANGAN/ Penggabungan POS/SUBPOS
- REVISI REDAKSIONAL (Legal Text)

PERUBAHAN CATATAN PENJELASAN

- Catatan Bab dan Catatan Sub Pos
- Explanatory Notes
- Supplementary Explanatory Notes

TABEL KORELASI

12 14.04 : Other Vegetable products not elsewhere specified or included.

... of a kind used primarily in perfumery, in pharmacy or

... of a kind used primarily in pharmacy

Terdapat perubahan cakupan pada pos 12.11

purposes, whether or not cut,

purposes, fresh, chilled, frozen or dried, whether or

20.08: Fruit, nuts and other edible parts of plants, otherwise prepared or preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter or spirit, not elsewhere specified or included, Of stems, roots and other edible parts of plants, not including fruits or nuts

1211.90.14.00 - - Other, in cut, crushed or powdered form

1211.90.16 - - - Other, in cut, crushed or powdered form

1211.90.19.00 - - Other:

1404.90.90.00

2008.99.30.00



REVISI LEGAL TEXT

AHTN 2012		AHTN 2017	
HS CODE	DESCRIPTION	HS CODE	DESCRIPTION
12.07	Other oil seeds and oleaginous fruits, whether or not broken.	12.07	Other oil seeds and oleaginous fruits, whether or not broken.
1207.10	- Palm nuts and kernels:	1207.10	- Palm nuts and kernels:
1207.10.10.00	- - Suitable for sowing	1207.10.10	- - Palm nuts suitable for sowing/planting
1207.10.20.00	- - Not suitable for sowing	1207.10.30	- - Kernels
		1207.10.90	- - Other
1207.70.00.00	- Melon seeds	1207.70.00	- Melon seeds
	- Other:		- Other:
1207.99	- - Other:	1207.99	- - Other:
1207.99.40.00	- - - Illipe seeds (Illipe nuts)	1207.99.40	- - - Illipe seeds (Illipe nuts)
		1207.99.50	- - - Fresh fruit bunch of oil palm
1207.99.90.00	- - Other	1207.99.90	- - - Other

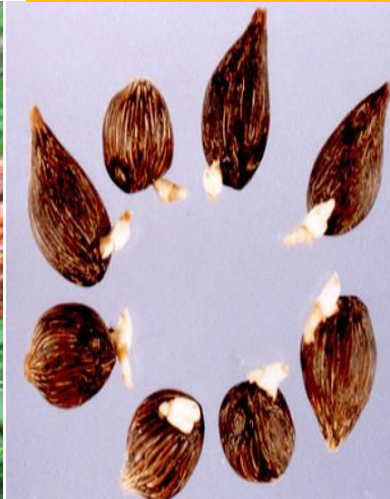


PALM

Fresh Fruit Bunch

Palm nut for sowing

Empty Fruit Bunch



Different varieties

DURA (thin kernel and thick shell)

TENEERA (thick kernel and thin shell)



mesocarp



PENAMBAHAN SUBPOS

AHTN 2012		AHTN 2017	
HS CODE	DESCRIPTION	HS CODE	DESCRIPTION
15.11	Palm oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified.	15.11	Palm oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified.
1511.10.00.00	- Crude oil	1511.10.00	- Crude oil
1511.90	- Other:	1511.90	- Other:
	- - Fractions of unrefined oil:	1511.90.20	- - Refined oil
1511.90.11.00	- - - Solid fractions		- - Fractions of refined oil:
1511.90.19.00	- - - Other		- - - Solid fractions:
	- - Other.	1511.90.31	- - - - With iodine value 30 or more, but less than 40
			- Fractions of unrefined oil:
		1511.90.41	- - - Solid fractions
		1511.90.42	- - - Other, with packing of a net weight not exceeding 25 kg
		1511.90.49	- - - Other



RESTRUCTURE

AHTN 2012		AHTN 2017	
HS CODE	DESCRIPTION	HS CODE	DESCRIPTION
1511.10.00.00	- Crude oil	1511.10.00	- Crude oil
1511.90	- Other:	1511.90	- Other:
	- - Fractions of unrefined oil:	1511.90.20	- Refined oil
1511.90.11.00	- - - Solid fractions		- - Fractions of refined oil:
1511.90.19.00	- - - Other		- - - Solid fractions:
	- - Other:	1511.90.31	- - - With iodine value 30 or more, but less than 40
1511.90.91	- - - Solid fractions	1511.90.32	- - - Other
1511.90.91.10	- - - In packings of a net weight not exceeding 20 kg		- - - Liquid fractions:
1511.90.91.90	- - - - other	1511.90.36	- - - In packing of a net weight not exceeding 25 kg
1511.90.92.00	- - - Other, in packings of a net weight not exceeding 20kg	1511.90.37	- - - Other, with iodine value 55 or more but less than 60
1511.90.99.00	- - - Other	1511.90.39	- - - Other
			- - Fractions of unrefined oil:



CONTOH HS MERGED

BTKI 2012		BTKI 2017	
1701	Gula tebu atau gula bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat.	1701	Gula tebu atau gula bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat.
	- Lain-lain :		- Lain-lain :
1701.99	-- Lain-lain :	1701.99	-- Lain-lain :
	--- Gula dimurnikan :	1701.99.10	--- Gula dimurnikan
1701.99.11.00	---- Putih		
1701.99.19.00	---- Lain-lain		

IJIN : PI Gula dan API-P (HS 1701.99.11.00 dan 1701.99.19.00)

No. SKEP : Peraturan Men. Perdagangan No. 117/M-DAG/PER/12/2015

KOMODITI BARANG : Gula

PENGGABUNGAN POS/SUBPOS

AHTN 2012		AHTN 2017	
HS	DESCRIPTION	HS	DESCRIPTION
2848.00.00.00	Phosphides, whether or not chemically defined, excluding ferrophosphorus.	..Deleted & shifted..	
TIDAK TERKENA LARTAS			
2853.00.00.00	Other inorganic compounds (including distilled or conductivity water and water of similar purity); liquid air (whether or not rare gases have been removed);	28.53	Phosphides, whether or not chemically defined, excluding ferrophosphorus; other inorganic compounds (including distilled or conductivity water and water of similar purity); liquid air ...;
		2853.10.00	- Cyanogen chloride (chlorcyan)
		2853.90	- Other:
		2853.90.10	- Demineralized waters
		2853.90.90	- Other
TERKENA LARTAS			

Komoditi selain Phosphide... TERKENA LARTAS Permendag 75/2014 mk Peraturan yg dibuat oleh K/L harus jelas menuliskan jenis barang apa saja yg terkena LARTAS dan gunakan ex sbm kode HS. Dg dmk, Petugas Analyzing Point DJBC akan meneliti apakah barang yg diberitahukan dg kode HS 2853.90.90 terkena ketentuan LARTAS/ tidak



PENAMBAHAN SUBPOS

AHTN 2012		AHTN 2017	
HS CODE	DESCRIPTION	HS CODE	DESCRIPTION
	- Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining:		- Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining:
3823.11.00.00	- - Stearic acid	3823.11.00	- - Stearic acid
3823.1...	- -	3823.1...	- - ...
3823.19	- - Other:	3823.19	- - Other:
3823.19.10.00	- - - Acid oils from refining	3823.19.10	- - - Acid oils from refining:
		3823.19.20	- - - Palm fatty acid distillate
		3823.19.30	- - - Palm kernel fatty acid distillate
3823.19.90.00	- - - Other	3823.19.90	- - - Other



Explanatory Notes To HS 38.23

- (2) **Commercial oleic acid (olein)** which is a colourless to brown oily liquid with a characteristic odour.
- (3) **Tall oil fatty acids (TOFA)** which consist primarily of oleic and linoleic acid. They are obtained by the distillation of crude tall oil and contain by weight 90 % or more (calculated on the weight of the dry product) of fatty acids.
- (4) **Distilled fatty acids** which are obtained after hydrolytic splitting of various fats and oils (e.g., coconut oil, palm oil, tallow) followed by a purification process (distillation).
- (5) **Fatty acid distillate**, obtained from fats and oils which have been subjected to vacuum distillation in the presence of steam as part of a refining process. Fatty acid distillate is characterised by a high free fatty acid (ffa) content.
- (6) **Fatty acids obtained by catalytic oxidation** of synthetic hydrocarbons of a high molecular weight.
- (7) **Acid oils from refining**, with a relatively high free fatty acid content, prepared by decomposing with mineral acid the soap-stock obtained during the refining of crude oils.

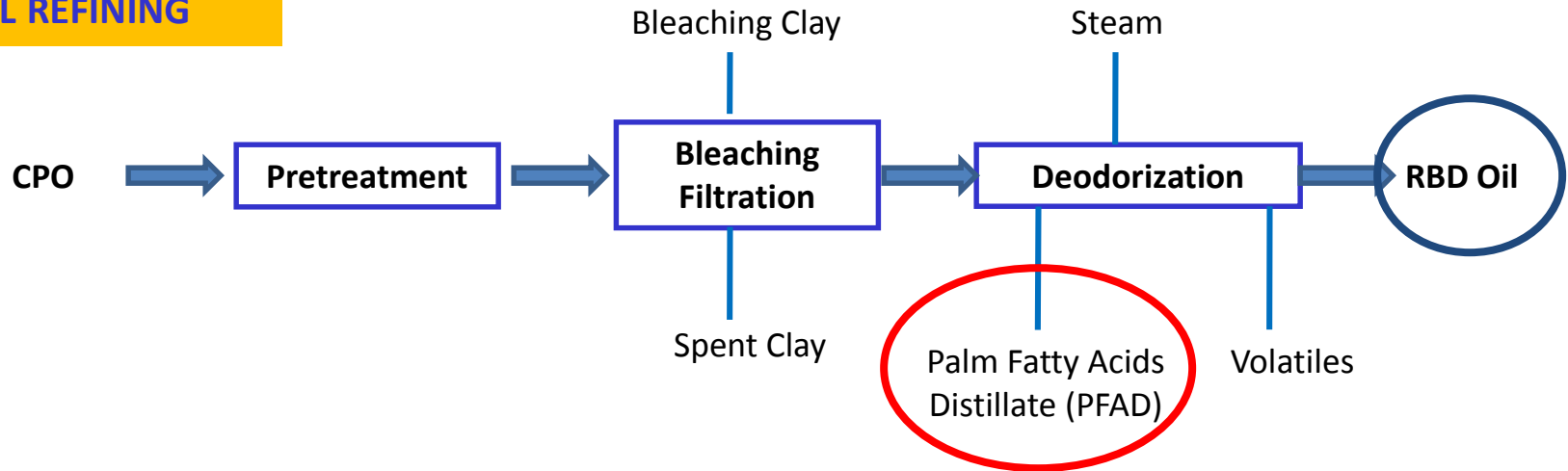
The heading **excludes** :

- (a) Oleic acid, of a purity of 85 % or more (calculated on the weight of the dry product) (**heading 29.16**).
- (b) Other fatty acids of a purity of 90 % or more (calculated on the weight of the dry product) (generally **heading 29.15, 29.16 or 29.18**).

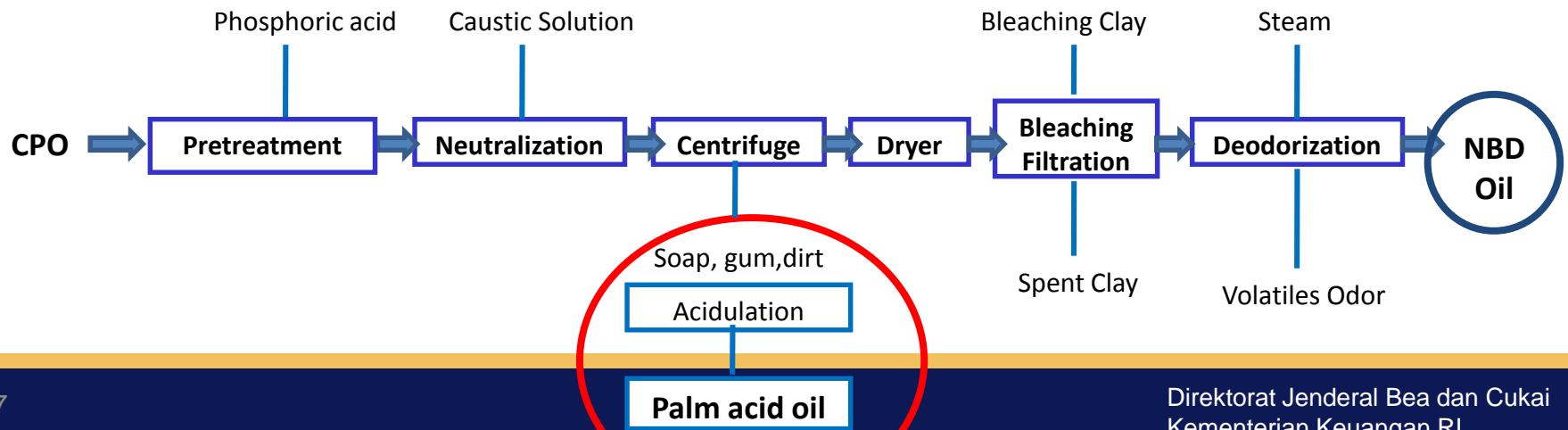


REFINING PROCESS OF CPO

PHYSICAL REFINING



CHEMICAL REFINING



AHTN 2012		AHTN 2017	
HS CODE	DESCRIPTION	HS CODE	DESCRIPTION
38.26	Biodiesel and mixtures thereof, not containing or containing < 70 % ...	38.26	Biodiesel and mixtures thereof, not containing or containing < 70 %...
			- Biodiesel, not containing petroleum oil:
3826.00.10.00	- Coconut methyl ester (CME)	3826.00.10	- - Coconut methyl ester (CME)
			- - Palm Methyl Ester(including palm kernel methyl ester):
		3826.00.21	- - - With ester alkyl content 96.5% or more but not exceeding 98%
		3826.00.22	- - - With ester alkyl content exceeding 98%
3826.00.90	- Other	3826.00.29	- - - Other
3826.00.90.10	- - Fatty Acid Methyl Ester (FAME)	3826.00.30	- - Other
3826.00.90.90	- - - Other	3826.00.90	- Other



PEMECAHAN POS/SUBPOS

AHTN 2012		AHTN 2017	
44.01	Fuel wood, in logs, in billets, in twigs, in faggots or in similar forms; wood in chips or particles; sawdust and wood waste and scrap, whether or not agglomerated in logs, briquettes, pellets or similar forms.	44.01	Fuel wood, in logs, in billets, in twigs, in faggots or in similar forms; wood in chips or particles; sawdust and wood waste and scrap, whether or not agglomerated in logs, briquettes, pellets or similar forms.
4401.10.00	- Fuel wood, in logs, in billets, in twigs, in faggots or in similar forms	4401.11.00	- Fuel wood, in logs, in billets, in twigs, in faggots or in similar forms
		4401.12.00	- - Coniferous
			- - Non-coniferous



PENGGABUNGAN POS/SUBPOS

AHTN 2012		AHTN 2017	
HS CODE	DESCRIPTION	HS CODE	DESCRIPTION
48.10	Paper and paperboard, coated on one or both sides with kaolin (China clay) or other inorganic substances, with or without a binder, and with no other coating, whether or not surface-coloured, surface-decorated or printed, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size.	48.10	Paper and paperboard, coated on one or both sides with kaolin (China clay) or other inorganic substances, with or without a binder, and with no other coating, whether or not surface-coloured, surface-decorated or printed, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size.
	- - - Other:		- - - Other:
4810.13.91	- - - - Of a width of 150 mm or less:	4810.13.91	- - - - Of a width of 150 mm or less
4810.13.91.10	- - - - - Banknotes paper		
4810.13.91.90	- - - - - Other		



Contoh SEN

- **BARECORE (4421.99.96)**

Barecore is wood panel made by glueing strips of wood side by side, usually made of albizia wood and used for cores in the manufacturing of blockboard.





Download PMK 6/PMK.010/2017

<http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2017/6~PMK.010~2017Per.pdf>

Update patch modul terkait pemberlakuan BTKI 2017 (modul ekspor/ impor/ KITE/ TPB BC2.3/ PP-SAD/ PP-FTZ03):

<http://www.beacukai.go.id/berita/update-patch-modul-terkait-pemberlakuan-btki-2017.html>



**Direktorat Teknis Kepabeanaan
Subdit Klasifikasi Barang**
Email : klasifikasi.barang@yahoo.com
Telepon : 021-29688521, 522
Fax : 021-4897928



Kesepakatan DJBC – INSW – K/L

Per 1 Maret 2017, PIB/PEB yang masih menggunakan HS 2012 (10 digit) akan ***direject*** oleh sistem INSW

Dokumen perizinan atas barang lartas yang diterbitkan oleh Kementerian / Lembaga Teknis mulai tanggal 1 Maret 2017 ditetapkan mengikuti HS 2017

perizinan atas barang lartas yang diterbitkan sebelum tanggal 1 Maret 2017 (masih menggunakan HS 2012) **dinyatakan tetap berlaku**

BEBERAPA VALIDASI DILAKUKAN ANALYZING POINT